

**PERJUANGAN POLITIK K.H. AHMAD DAHLAN DALAM  
MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA 1912-1923**

**JURNAL**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra



Oleh :  
**Nur Febriyanto**  
**13407141012**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2017**

## **PERJUANGAN POLITIK K.H. AHMAD DAHLAN DALAM MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA 1912-1923**

Oleh : Nur Febriyanto  
13407141012

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya perhatian atas sejarah tokoh K.H. Ahmad Dahlan dalam bidang politik, yang sejak awal pendirian Muhammadiyah telah bersinggungan dengan politik. Tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk: 1. Mengetahui latar belakang kehidupan K.H. Ahmad Dahlan, 2. Mengetahui situasi politik awal abad 20, 3. Menganalisa dan mengetahui gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah tahun 1912-1923.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis melalui studi pustaka. Metode yang digunakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Heuristik, merupakan tahapan peneliti dalam mengumpulkan sumber, 2. Kritik sumber, merupakan tahapan untuk menyaring secara kritis sumber sejarah yang telah didapatkan, 3. Interpretasi, yaitu penafsiran fakta-fakta sejarah menjadi satu kesatuan dan menurut kaidah yang sudah ditentukan, 4. Historiografi, yaitu tahap akhir peneliti dalam menyajikan semua fakta dalam sebuah tulisan sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. K.H. Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1869 di Kauman Yogyakarta dengan nama Muhamad Darwis. Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan (stagnasi), kebodohan, serta keterbelakangan. 2. Kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam tidak bisa dilepaskan dari kondisi dan situasi pada awal abad 20. Pemerintah Hindia Belanda menaruh kecurigaan terhadap para haji, karena para haji dianggap sebagai biang keladi pemberontakan yang pernah terjadi. Akibatnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang sebenarnya bertujuan untuk menekan dan membatasi ruang gerak islam. 3. Gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan dimulai ketika proses pengajuan badan hukum Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda. Dalam merespons kebijakan politik ordonansi guru K.H. Ahmad Dahlan melalui utusannya untuk mencabut ordonansi guru tersebut. Kemudian kebijakan ordonansi haji, K.H. Ahmad Dahlan melakukan upaya perbaikan dalam pelaksanaan perhajian, sehingga pada tahun 1922 *Volksraad* mengadakan perubahan bahan dalam ordonansi haji dan memunculkan *Pilgrim Ordonantie* 1922.

Kata kunci: *Perjuangan Politik, K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah.*

## ABSTRACT

The background of the study was motivated by the lack of concern over the history of notable K.H. Ahmad Dahlan in the political sphere in which since the beginning establishment of Muhammadiyah, he had been surrounded by politics. The aims of this thesis are: (1) to reveal K.H. Ahmad Dahlan's early life, (2) to analyze the political situation of the early 20th century, and (3) to scrutinize K.H. Ahmad Dahlan's political movement in Muhammadiyah from 1912 to 1923.

This thesis was written by the use of critical history method through the study of the literature. The method applied several steps as follows. Firstly, heuristics which was the stage of collecting sources by the researcher. Secondly, source criticism which was the stage for filtering sources that have been obtained critically. Thirdly, interpretation was the stage of interpreting the historical facts into a coherent unit according to the determined rules. Fourthly, historiography was the final stage of the researcher in presenting the whole facts into a historical writing.

The findings of this research show that: (1) K.H. Ahmad Dahlan was born in 1869 in Kauman of Yogyakarta by the name of Mohammed Dervish. His thoughts began from the concern towards the situation and conditions of Moslems at that time as it was immersed in *kejumudan* (stagnation), ignorance, and regression; (2) the Dutch East Indies Government's political policy against Islam could not be separated from conditions and circumstances at the beginning of the 20th century. Dutch East Indies Government suspected against the Hajj: they were considered as the cause of the uprising that happened at that time. As a result, the Government of the Dutch East Indies applied various policies to suppress and limit the capabilities of Islam. K.H. Ahmad Dahlan's political movement began from the submission process of legal entity Muhammadiyah to the Dutch East Indies government. In response to the political policy of ordinance teacher, K.H. Ahmad Dahlan revoked the teacher's ordinance via his delegate. Then, in policy of ordinance hajj, K.H. Ahmad Dahlan made an effort to improve the implementation of the hajj. As a result, in 1922 the *Volksraad* renewed the draft material of ordinance of Hajj and the Pilgrim Ordonantie 1922 was made.

Keywords: Political Struggle, K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah.

## A. Pendahuluan

Sejak tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan Politik Etis di tanah jajahannya sebagai politik balas budi, sehingga orang Indonesia dilibatkan dalam hal yang menjadi kepentingannya. Politik Etis resmi menjadi kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan tersebut merupakan bentuk kolonialisme baru. Kebijakan Politik Etis bidang pendidikan bertujuan untuk menghasilkan elite baru yang bisa diajak kerjasama oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi tidak sedikit kaum elite yang merasa tidak puas. Ketidakpuasan itu memicu kaum elite terpelajar pribumi berbalik memimpin gerakan anti penjajahan.<sup>1</sup>

Perubahan arah politik kolonial dan semakin buruknya kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya menyebabkan kebangkitan Islam Nusantara. Hal ini mendorong penduduk pribumi untuk mengubah perjuangan melawan Belanda dari strategi militer ke perlawanan yang damai dan terorganisir. Pada awal abad ke-20 kesadaran rakyat Indonesia mengalami peningkatan dalam berbagai hal. Muncul berbagai organisasi-organisasi yang terorganisasi dan strategis yang membawa arah perubahan kedepannya. Kebangkitan Islam semakin berkembang dengan munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan, diantaranya adalah Muhammadiyah.<sup>2</sup>

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H. bertepatan dengan 18 November 1912 M. di Yogyakarta. Amal usaha Muhamadiyah menjadikan organisasi ini dalam bentuk gerakan *civil society* lewat gerakan dakwah. Sebagai gerakan *civil society*<sup>3</sup> Muhammadiyah telah menjalankan politiknya, dalam kehidupan nasional

---

<sup>1</sup> M. C. Riklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta : Serambi, 2005), hlm. 336-337.

<sup>2</sup> Husain Haikal, “Sayap Pembaharu & Tradisional Islam (Mitos atau Realitas?)”, *Al-Jami'ah*, (No. 2, Vol. 38, Tahun 2000), hlm. 421.

<sup>3</sup> *Civil society* merupakan terjemahan dari kata Latin *civilis societas*, mula-mula dipakai oleh Cicero (106-43 SM) *civil society* disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Lihat dalam Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 137.

Muhammadiyah telah berkiprah untuk pergerakan kebangkitan kebangsaan, meletakkan fondasi negara, cita-cita kemerdekaan, serta memelihara politik Islam.<sup>4</sup>

Latar belakang berdirinya Muhammadiyah dikarenakan K.H. Ahmad Dahlan merasa sedih dan gelisah melihat keadaan kaum muslim Indonesia dan khususnya di Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu kondisi umat Islam Indonesia pada saat itu secara umum rendahnya pemahaman terhadap ajaran Islam sebagai akibat rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki.<sup>5</sup> Faktor eksternal yaitu semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda ke Indonesia, dan pengaruh dari gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Pada awal pendiriannya perkumpulan ini hanya bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan saja, namun bukan berarti tidak bergerak dalam bidang politik.<sup>6</sup>

Dalam perjalanan kehidupan K.H. Ahmad Dahlan tidak lepas dari pergerakan politik dan komunikasi politik demi tercapainya tujuan mendirikan Muhammadiyah. Komunikasi politik intensif dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan dengan beberapa organisasi sosial. Hubungan dan komunikasi politik tersebut ketika Budi Utomo mengambil peran dalam proses permohonan pendirian Muhammadiyah kepada pemerintah. Pada ranah politik, ketika berhadapan dengan pemerintah kolonial dalam taktik Muhammadiyah memilih politik *kooperatif*, ketika kebanyakan perkumpulan dan pergerakan memilih *non-kooperatif*.<sup>7</sup>

Dalam praktik politik sehari-hari K.H. Ahmad Dahlan, selalu menjalin hubungan bahkan menjadi bagian dari pihak-pihak yang memiliki pilihan beda tersebut. K.H Ahmad Dahlan menjalin kedekatan dengan tokoh-tokoh Budi Utomo

---

<sup>4</sup> Hedar Nashir, *Muhammadiyah Abad Kedua*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 53-54.

<sup>5</sup> Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 24.

<sup>6</sup> Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES. 1996), hlm. 68-71.

<sup>7</sup> Zuli Qodir, dkk. *Ijtihad Politik Muhammadiyah : Politik Sebagai Asmaul Husna*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 35

seperti dr. Wahidin Soediro Hoesodo. Bahkan K.H. Ahmad Dahlan pernah menjadi Penasehat Boedi Oetomo. Begitu juga dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam (SI) seperti, H.O.S Tjokro Aminoto. K.H Ahmad Dahlan juga pernah menjadi anggota dan Penasehat organisasi ini. Pada waktu Sarekat Islam (SI) mengadakan kongres di Cirebon tahun 1921, Muhammadiyah membantu penyelenggaraannya K.H Ahmad Dahlan diminta memberi prasaran.<sup>8</sup>

Berdirinya Muhammadiyah bermula dari perbincangan K.H. Ahmad Dahlan dan Organisasi Budi Utomo. Pertemuan K.H. Ahmad Dahlan dengan Budi Utomo dimulai tahun 1909 melalui Djojosumarto. Pertemuan itu menyebabkan K.H. Ahmad Dahlan ditunjuk sebagai penasihat masalah-masalah agama. Melalui posisi ini K.H. Ahmad Dahlan memulai sasaran gandanya yaitu mempelajari ilmu keorganisasian dan mengaktualisasikan ajaran Islam.<sup>9</sup> Sebelum Muhammadiyah tersebar merata di seluruh Indonesia, K.H. Ahmad Dahlan telah melakukan berbagai upaya legalisasi terhadap organisasi yang baru didirikannya itu.

Upaya untuk mengeksistensikan gerakan politiknya K.H. Ahmad Dahlan pertama kali dapat ditelusuri ketika berusaha mencari pengakuan badan hukum oleh pemerintahan Hindia Belanda, yang akhirnya Muhammadiyah mendapat pengesahan dari permohonannya, tepatnya tanggal 22 Agustus 1914 dan ditetapkan melalui peraturan *Besluit* No.81. Meski statusnya sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah justru lebih banyak bersinggungan dengan politik praktis.<sup>10</sup>

Lewat berbagai gerakan yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan, sehingga secara tidak langsung K.H. Ahmad Dahlan telah bersinggungan dengan politik. Gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan pada tahap awal berdirinya Muhammadiyah adalah agar tercapainya cita-cita sosialnya, yang pada waktu itu umat muslim yang mengalami kemerosotan, baik moral, maupun pendidikan agama. K.H. Ahmad

---

<sup>8</sup> Leny Marlina, Leny Marlina, “Kajian Terhadap Perkembangan Sekolah Muhammadiyah”, *TA'DIB*, Vol. XVII, No. 01, Edisi Juni 2012, hlm. 108.

<sup>9</sup> Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamikan Politik Indonesia 1966-2006*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 24-27.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 84.

Dahlan lewat Muhammadiyah dengan gerakan politiknya pada masa awal sebagai upaya perintisan pondasi awal Muhammadiyah dalam berpolitik, meskipun tidak langsung menyatakan politik. Gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan dapat ditelusuri lewat berbagai gerakan-gerakan yang bersinggungan dengan pemerintah Hindia Belanda.

## **B. Riwayat Hidup K.H Ahmad Dahlan**

K.H. Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1869 di Kauman Yogyakarta dengan nama Muhamad Darwis. Ayahnya bernama Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Sulaiman, seorang khatib tetap di masjid Sultan dikota tersebut. Sementara ibunya bernama Siti Aminah, adalah anak seorang penghulu di Kraton Yogyakarta, Haji Ibrahim. K.H. Ahmad Dahlan adalah anak ke empat dari tujuh bersaudara. Adapun saudara Muhammad Darwis menurut urutannya adalah: (1) Nyai Chatib Arum, (2) Nyai Muhsinah (Nyai Nur), (3) Nyai H. Sholeh, (4) M. Darwis (K.H.A. Dahlan), (5) Nyai Abdurrahman, (6) Nyai H. Muhammad Fekih (Ibu H. Ahmad Badawi), dan (7) Muhammad Basir.<sup>11</sup>

K.H. Ahmad Dahlan tidak menuntut ilmu pada sekolah *Gubernamen*, ia mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan dari ayahnya sendiri.<sup>12</sup> Setelah dewasa barulah K.H. Ahmad Dahlan diserahkan kepada Kyai Haji Muhammad Soleh untuk belajar ilmu Fiqih (hukum agama Islam) dan kepada Kyai Haji Muchsin untuk belajar ilmu Nahwu dan *Shorof* (struktur dan tata bahasa arab) serta kepada Syeikh Amin dan Syeikh Sayyid Bakri Syata' untuk belajar ilmu *Qiro'atul qur'an* (membaca Al Qur'an). Untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya diserahkan kepada para ulama lainnya seperti Kyai Haji Muhammad Nur (*Hoofd* Panghulu Hakim Kota Yogyakarta) dan Kyai Haji Abdul Hamid dari kampung Lempuyangan Wangi Yogyakarta.

---

<sup>11</sup> Muhammad Soedja', *Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1993 ), hlm. 202.

<sup>12</sup> Weinata Sairin, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 39.

Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan (stagnasi), kebodohan, serta keterbelakangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Latar belakang situasi tersebut telah mengilhami munculnya ide pembaharuan K.H. Ahmad Dahlan. K.H. Ahmad Dahlan beranggapan, bahwa upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan.<sup>13</sup>

### C. Situasi Politik Awal Abad 20

Perubahan arah politik di negeri Belanda mulai berubah setelah pemilihan umum tahun 1901. Partai Liberal yang menguasai politik selama lima puluh tahun telah keluar dari arena politik, dan sibuk dengan kitab tuntunan dan agama telah membuat kelompok kanan dan kelompok agama berkoalisi. Kedua kelompok tersebut menetapkan untuk kembali kepada prinsip-prinsip Kristen dalam pemerintahan. Pidato tahunan kerajaan bulan September 1901 telah menunjukkan semangat Kristen ketika Ratu berkata tentang suatu kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia-Belanda. Berdasarkan pidato Ratu tersebut diberlakukanlah di Hindia-Belanda.<sup>14</sup>

Pihak Belanda menyebutkan tiga prinsip dasar kebijakan baru tersebut: *edukasi*, *emigrasi*, dan *irigasi* (pendidikan, perpindahan penduduk, dan pengairan). Untuk melaksanakan proyek-proyek semacam itu diperlukan adanya dana. Oleh karena itulah, maka hutang pemerintah kolonial yang mencapai sekitar 40 juta *gulden* diambil alih oleh pemerintah Belanda, sehingga Batavia dapat meningkatkan pengeluaran uang tanpa harus dibebani hutang lagi, dan Politik Etis mulai berjalan. Indonesia mengalami perubahan dalam bidang pendidikan setelah

---

<sup>13</sup> Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993). hlm. 103.

<sup>14</sup> Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Terj. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984). hlm. 51.

dilaksanakannya Politik Etis pada awal abad ke-19 oleh Pemerintah Kolonial Belanda.<sup>15</sup>

Sebelum kedatangan C. Snouck Hurgronje ke Indonesia, pemerintah kolonial Belanda merasa takut dan khawatir terkait masalah Islam sehingga merumuskan tiga kebijakan pokok. Pertama, pemerintah Belanda harus mengadakan aliansi dengan para pangeran, priyai, raja atau sultan maupun kepala adat pribumi, karena mereka tidak terlalu fanatik bahkan anti Islam. Kedua, pemerintah kolonial Belanda harus mengadakan proses pengkristenan kepada sebagian besar masyarakat pribumi guna menghilangkan pengaruh Islam. Ketiga, pemerintah Belanda harus membatasi orang Islam pergi haji ke Mekkah karena orang haji dianggap biang keladi menyebarkan agitasi dan pemberontakan di Indonesia.<sup>16</sup>

Sejak kedatangan Snouck Hurgronje pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mempunyai beberapa kebijakan yang jelas mengenai Islam. Snouck Hurgronje berusaha mendudukan masalah antara ibadah haji dan fanatisme. Menurutnya, haji-haji itu tidak berbahaya bagi kedudukan pemerintahan kolonial di Indonesia, yang mungkin sekali berbahaya ialah apa yang disebutnya sebagai *koloni Jawa*, yaitu daerah tempat tinggal orang-orang yang berasal dari Indonesia di Mekah. Di sana mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha *Pan-Islamisme*. Para haji begitu sangat ditakuti, *hajiphobia* sebagai bagian dari *Islamophobia*. Dikarenakan adanya pandangan seperti itu maka orang yang akan melaksanakan ibadah haji selalu dihalangi dengan jalan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari penguasa Belanda.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Amir Sutarga, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm.176.

<sup>16</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980), hlm. 38-39.

<sup>17</sup> Yudha, "Pengaruh Haji Terhadap Politik Islam di Indonesia (Tahun 1900-1945)", *THAQAFIYYAT.*, Vol. 16, No. 1, Juni 2015, hlm. 39.

Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda menganggap bahwa aspek politik dari Islam dan hubungan politik saja yang dianggap berbahaya. Oleh karena itu harus diawasi dan ditindak secara tegas. Pada waktu itu, ada dua isu politik Islam yang dianggap penting, yakni Pan Islamisme dan nasionalisme. Dari segi politik haji, kedua isu tersebut dikaitkan dengan ibadah haji dan orang yang naik haji. Politik haji pada awal abad ke-20 lebih mengarah pada pengawasan terhadap pengaruh kedua gerakan politik, yaitu Pan Islamisme dan nasionalisme.<sup>18</sup>

Awal abad 20 ditandai dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam Indonesia yang pergi haji dan yang bermukim di Mekkah, mendorong pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan berbagai kebijakan politik, guna membendung gerakan-gerakan yang nantinya akan merusak kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyadari ketidakpeduliannya selama ini terhadap perjalanan haji umat Islam Indonesia, secara tidak langsung menumbuhkan fanatisme sehingga bisa mengancam eksistensi politik pemerintah Hindia Belanda.<sup>19</sup>

Akibat dari semakin banyaknya jumlah jamaah haji yang datang ke Mekkah, tidak sedikit dari para jamaah haji pulang dengan membawa ajaran ortodoks setelah menunaikan ibadah haji atau setelah sekian lama bermukim di tanah suci. Pemerintah Belanda juga melihat bahwa banyaknya perlawanan rakyat yang ditujukan kepada pemerintah Belanda memang banyak yang dimotori dan dipimpin oleh para haji. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Hindia Belanda beranggapan bahwa ibadah haji adalah penyebab penduduk pribumi menjadi fanatik dan akan menentang pemerintah Belanda, sehingga akan membahayakan kedudukannya di tanah air. Oleh sebab itu, pihak pemerintah Belanda mengeluarkan bermacam-macam peraturan yang dapat membatasi dan mempersulit ibadah haji. Diantaranya adalah mengeluarkan kebijakan tentang ordonansi haji dan ordonansi guru agama.

---

<sup>18</sup> Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta : Lkis, 2007), hlm. 119.

<sup>19</sup> M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial* (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), hlm. 84.

#### D. Gerakan Politik K.H. Ahmad Dahlan

Dalam rangka pendirian Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan melakukan berbagai langkah sebagai persiapan berdirinya Muhammadiyah. Pada tanggal 20 Desember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan surat permintaan badan hukum kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan mengirim “*Statuten Muhammadiyah*”. Permintaan izin tersebut baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 22 Agustus 1914 melalui *Besluit* Gubernur Jenderal No. 81, izin operasi tersebut hanya dibatasi di wilayah Yogyakarta.<sup>20</sup>

K.H. Ahmad Dahlan melihat bahwa perkembangan Muhammadiyah sangat pesat, baik dari dalam maupun dari luar kota Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan merasa perlu mengajukan izin kepada pemerintah Hindia Belanda, karena mengingat badan hukum yang pertama diberikan hanya sebatas wilayah Yogyakarta saja. Tepatnya pada tanggal 20 Mei 1920, K.H. Ahmad Dahlan kembali mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda agar ruang geraknya diperluas sampai daerah kekuasaan Hindia Belanda.<sup>21</sup>

Selanjutnya dalam tempo tiga bulan atau tepatnya tanggal 16 Agustus 1920, pemerintah Hindia Belanda menyetujui permohonan Muhammadiyah, lewat *Besluit* No. 40.<sup>22</sup> Usaha K.H. Ahmad Dahlan tidak berhenti disitu saja, usaha memperoleh pengakuan badan hukum dari pemerintah Hindia Belanda terus dilakukan. Delapan bulan setelah dikeluarkannya *Besluit* No. 40 tanggal 1920, tepatnya tanggal 7 Mei 1921, K.H. Ahmad Dahlan mengajukan kembali permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda melalui *Hoofdbestuur* Muhammadiyah untuk mengubah artikel-artikel tersebut.

---

<sup>20</sup> *EXTRACT uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Buitenzorg, den 22 sten Augustus 1914, No. 81.*

<sup>21</sup> Syaifullah, *op. cit.* hlm. 84.

<sup>22</sup> *UITREKSEL, uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Batavia, den 16 Augustus 1920, No. 40.*

Permohonan tersebut dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda lewat *Besluit* No. 36 bulan September 1921.<sup>23</sup> Setiap tempat di Hindia Belanda, jika telah memiliki sebelas orang anggota Muhammadiyah, sudah dapat mendirikan cabang Muhammadiyah. Setelah munculnya perijinan tersebut, cabang Muhammadiyah terus berkembang di berbagai daerah, dalam kurun waktu 3 tahun saja Muhammadiyah sudah memiliki 14 cabang.<sup>24</sup>

Setelah dikeluarkannya *Gouvernements Besluit* No 40 tanggal 16 Agustus 1920, yang mengizinkan Muhammadiyah berkembang di seluruh Hindia Belanda, sehingga dengan adanya ordonansi guru 1905 tersebut menghambat perkembangan pendidikan di luar daerah residen Yogyakarta. Situasi tersebut membuat K.H. Ahmad Dahlan untuk menyelesaikan permasalahan ordonansi guru dengan membawa masalah tersebut ke dalam untuk membahas persoalan Ordonansi Guru dalam Kongres al-Islam di Cirebon tahun 1921.<sup>25</sup> Pemerintah Belanda akhirnya mengabulkan permohonan Muhammadiyah untuk mencabut Ordonansi Guru tahun 1905. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan regulasi baru melalui *Staatsblad* 925 Nomor 219 tahun 1925.<sup>26</sup>

Para haji pergi ke Mekkah tidak hanya untuk berhaji namun untuk mencari ilmu disana dan menerima semangat Pan Islamisme. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menerapkan kebijakan Ordonansi Haji, yang isinya merupakan aturan-aturan atau regulasi dalam berhaji. Meskipun sebenarnya isinya cenderung menguntungkan pihak pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, penyelenggaraan haji lebih berkonotasi ekonomi dan jauh dari

---

<sup>23</sup> *UITREKSEL, uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Batavia, den 2 September 1921, No. 36.*

<sup>24</sup> Abu Mujahid, *Sejarah Muhammadiyah: Gerakan "Tajdid" di Indonesia bagian I.* (Bandung: Too Bagus Publishing, 2013), hlm. 200.

<sup>25</sup> Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Cet. Pertama, (Bandung: Mizan, 1998). hlm. 158.

<sup>26</sup> Farid Setiawan, "Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah terhadap Ordonansi Guru", *Jurnal Pendidikan Islam* : Volume III, No 1, Juni 2014, hlm. 62.

tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda membiarkan perhajian Indonesia dalam kondisi kurang dan tidak terjamin baik pelayanan maupun kesehatan dan keamanan dalam perjalanannya.<sup>27</sup>

Secara resmi tuntutan dan aspirasi perbaikan perjalanan haji Indonesia tertampung dan mulai tahun 1921. K.H. Ahmad Dahlan menuntut Kongsi Tiga, supaya mengadakan perbaikan-perbaikan, penertiban pelayaran di atas kapal. Kemudian tahun 1922 *Volksraad* mengadakan perubahan-perubahan pada *Pilgrims Ordonantie. Hoofdbestuur* Muhammadiyah yakni K.H. Ahmad Dahlan mengutus anggotanya, K.H. M. Sudjak dan M. Wirjopertomo ke Mekkah untuk meninjau dan mempelajari masalah yang menyangkut perjalanan haji. Wadah gagasan perbaikan, penertiban haji ini diwujudkan pertama kali dalam badan yang disebut penolong haji (PH) di bawah pimpinan K.H. Ahmad Dahlan.<sup>28</sup>

#### **E. Kesimpulan**

K.H. Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1869 di Kauman Yogyakarta dan wafat pada jumat malam 7 Rajab tahun 134 Hijriyah (23 Februari 1923) dalam usia 55 tahun. K.H. Ahmad Dahlan adalah anak ke empat dari tujuh bersaudara. Ayahnya bernama Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Sulaiman, ibunya bernama Siti Aminah. K.H. Ahmad Dahlan secara dini mendapat pendidikan dari ayahnya sendiri. Dua kali berangkat ke Mekkah K.H. Ahmad Dahlan untuk melaksanakan haji dan memperdalam ilmu agama di Mekkah. Perjumpaannya dan dialog dengan Rasyid Ridha ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap pemikiran K.H. Ahmad Dahlan.

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan terhadap pemerintah Hindia Belanda bercorak “Rival-Moderat”. Tidak ditemukan sama sekali bahwa adanya ucapan-ucapan atau pun tulisan-tulisan secara

---

<sup>27</sup> Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 156.

<sup>28</sup> Ali Mufrodi, *Haji Indonesia dalam Perspektif Historis*. Disampaikan dalam Peresmian Jabatan Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003. hlm. 14.

terang-terangan menentang pemerintah Hindia Belanda. Hal ini bukan berarti K.H. Ahmad Dahlan memihak Belanda. Meski secara lisan ia tidak mengecam Belanda namun gerakannya berorientasi pada kesejahteraan sosial dan peningkatan sumber daya manusia jelas merupakan bukti usahanya melawan penjajahan. Jelas sekali terlihat dari berbagai gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan yang terkesan “menghormati” keberadaan pemerintah Hindia Belanda. Secara politis K.H. Ahmad Dahlan tidak pernah dibatasi gerakannya oleh pemerintah dan keberadaan Muhammadiyah tidak menjadi ancaman bagi pemerintah.

Izin pendirian Muhammadiyah tersebut diperjuangkan oleh K.H. Ahmad Dahlan dengan bantuan pimpinan Budi Utomo yang dekat dengan pemerintah Hindia Belanda. Usaha memperjuangkan legalitas gerakan ini berlangsung dalam tiga tahapan. Tahap pertama menghasilkan ruang gerak seluas residensi Yogyakarta. Tahap kedua menghasilkan izin ruang gerak seluas daerah kekuasaan Hindia Belanda dan tahap ketiga pendirian cabang-cabang Muhammadiyah di manapun di daerah kekuasaan Hindia Belanda.

Kemudian penerbitan ordonansi guru yang bersifat politis, yang bertujuan untuk melakukan kontrol atas lembaga pendidikan yang dicurigai sebagai ancaman potensial terhadap pemerintah. Tahun 1921 Fachroddin sebagai utusan K.H. Ahmad Dahlan membahas persoalan tersebut dalam Kongres al-Islam di Cirebon agar ordonansi guru dicabut, sehingga memunculkan resolusi baru berupa ordonansi guru 1925. Berbagai masalah dalam penyelenggaraan haji oleh Hindia Belanda membuat kecewa umat Islam. K.H. Ahmad Dahlan menuntut Kongsi Tiga, supaya mengadakan perbaikan-perbaikan, penertiban pelayaran di atas kapal. *Hoofdbestuur* Muhammadiyah mengutus anggotanya, K.H. M. Sudjak dan M. Wirjopertomo ke Mekkah untuk meninjau dan mempelajari masalah yang menyangkut perjalanan haji. Wadah gagasan perbaikan, penertiban haji ini diwujudkan pertama kali dalam badan yang disebut penolong haji (PH) di bawah pimpinan K.H. Ahmad Dahlan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip :

*EXTRACT uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Buitenzorg, den 22 sten Augustus 1914, No. 81.*

*UITREKSEL, uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Batavia, den 16 Augustus 1920, No. 40.*

*UITREKSEL, uit het Register den Besluiten van de Gouverneur General van Nederlandsch-Indie. Batavia, den 2 September 1921, No. 36.*

### Buku-Buku:

Abu Mujahid, *Sejarah Muhammadiyah: Gerakan "Tajdid" di Indonesia bagian I.* (Bandung: Too Bagus Publishing, 2013).

Ali Haidar, M., *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995),

Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Cet. Pertama, (Bandung: Mizan, 1998).

Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. (Jakarta: LP3ES, 1985).

Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).

Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980)

Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES. 1996).

Dien Majid, M., *Berhaji Di Masa Kolonial* (Jakarta: CV Sejahtera, 2008).

Muhammad Soedja', *Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1993).

Nasruddin Anshoriy Ch, M., *Matahari Pembaharuan : Rekam Jejak K.H. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta : Yogya Bangkit Publisher, 2010).

Nor Tofik, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : UIN. 1992).

Riklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta : Serambi, 2005),

Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta : Lkis, 2007).

Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia: 1966-2006*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Weinata Sairin, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

Zuli Qodir, dkk. *Ijtihad Politik Muhammadiyah : Politik Sebagai Asmaul Husna*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).

**Jurnal :**

Ali Mufrodi, *Haji Indonesia dalam Perspektif Historis*. Disampaikan dalam Peresmian Jabatan Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

Farid Setiawan, “Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah terhadap Ordonansi Guru”, *Jurnal Pendidikan Islam* : Volume III, Nomor 1, Juni 2014 52.

Husain Haikal, “Dinamika Muhammadiyah Menuju Indonesia Baru”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, (No. 25, th ke-6, September 2000).

Leny Marlina, “Kajian Terhadap Perkembangan Sekolah Muhammadiyah”, *TA'DIB*, Vol. XVII, No. 01, Edisi Juni 2012.

Yudha, Pengaruh Haji Terhadap Politik Islam di Indonesia (Tahun 1900-1945)., “*THAQAFIYYAT*”, Vol. 16, No. 1, Juni 2015.

Yogyakarta, 18 Oktober 2017

Pembimbing

Reviewer,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.  
NIP. 19620321 198903 1 001



Dr. Miftahuddin, M.Hum  
NIP. 19740302 200312 1 006